

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perubahan Kurikulum

2.1.1 Pengertian Perubahan

Perubahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan yang terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan (Hussain, 2016). Lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi, maupun lembaga pelatihan nonformal, dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian agar mampu menjalankan fungsi utamanya secara relevan dan efektif. Adaptasi ini mencakup pembaruan sistem pembelajaran, penguatan kompetensi pendidik, hingga penyempurnaan kurikulum sebagai instrumen utama dalam proses pendidikan. Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan oleh Hussain (2016), perubahan dalam sistem pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Proses ini kerap menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural, seperti resistensi dari pihak internal, keterbatasan sumber daya, hingga ketidaksiapan institusi dalam mengelola transformasi secara menyeluruh (Harahap et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi manajerial yang terencana dan inklusif agar setiap bentuk perubahan yang diupayakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Perubahan kurikulum merupakan salah satu strategi fundamental dalam menjawab tantangan zaman serta mempersiapkan generasi muda agar mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan di masa depan. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam proses pembelajaran, tetapi juga sebagai refleksi atas kebutuhan masyarakat dan tuntutan global yang terus berkembang. Oleh karena itu, penyesuaian kurikulum seperti implementasi Kurikulum Merdeka menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang relevan, fleksibel, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Agar

transformasi kurikulum ini berjalan optimal, dibutuhkan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, menyediakan sumber daya, dan memastikan bahwa hambatan-hambatan teknis maupun struktural dalam implementasi kurikulum dapat diatasi secara efektif (Sulistiyani, Mulyono, & Mulyono, 2022). Dalam konteks ini, guru memegang posisi strategis sebagai ujung tombak implementasi di lapangan. Mereka bukan hanya pelaksana kurikulum, tetapi juga agen perubahan yang berperan dalam menginternalisasikan nilai-nilai dan prinsip pembelajaran yang termuat dalam kurikulum baru. Maka dari itu, dukungan dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta lingkungan kerja yang kondusif menjadi faktor krusial untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Setiyojuliani & Andaryani, 2023). Pendekatan yang komprehensif dan berbasis kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong terciptanya pendidikan yang adaptif, partisipatif, dan bermutu.

Setiap perubahan kebijakan pada dasarnya merupakan proses transformatif yang kerap menimbulkan tantangan bagi kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Tidak terkecuali dalam konteks kebijakan pendidikan, perubahan kurikulum di Indonesia saat ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana proses reformasi kebijakan menuntut penyesuaian pada berbagai level, baik dari sisi sistem, pelaksana, maupun peserta didik. Transformasi kurikulum ini mencerminkan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tujuan utamanya adalah membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga kompetensi praktis dan karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan global yang kompleks dan terus berkembang. Dengan demikian, perubahan kurikulum tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga merupakan investasi jangka panjang dalam

pengembangan kualitas generasi masa depan yang adaptif, kritis, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

2.1.2 Pengertian Kurikulum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, serta materi pelajaran, beserta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran (Nurfitri et al., 2023). Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai kerangka dasar dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan agar selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, kurikulum memiliki peran sentral dalam menentukan arah perkembangan peserta didik, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kurikulum harus dilakukan secara sistematis, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan zaman agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pandangan para ahli menegaskan bahwa kurikulum memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Dede Rosyada berpendapat bahwa kurikulum merupakan elemen inti yang menentukan arah dan struktur pelaksanaan pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun madrasah. Kurikulum menjadi dasar konseptual sekaligus operasional dalam merancang kegiatan pembelajaran, menetapkan kompetensi yang harus dicapai, serta menentukan strategi evaluasi yang digunakan dalam proses pendidikan (Nurfitri et al., 2023). Sementara itu, Murray Print memberikan definisi yang lebih kontekstual dengan menekankan bahwa kurikulum adalah wadah yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik. Ia memandang kurikulum sebagai ruang yang mencakup berbagai pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik melalui interaksi dengan materi, guru, dan lingkungan saat proses

pembelajaran berlangsung (Hasbiyallah & Ihsan, 2011). Dengan demikian, kurikulum tidak hanya berisi rencana tertulis, tetapi juga melibatkan praktik konkret dalam penyampaian pengetahuan, nilai, dan keterampilan kepada peserta didik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta kesiapan pendidik dalam mentransformasikan kurikulum menjadi pengalaman belajar yang bermakna.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Good V. Carter, kurikulum dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan pembelajaran yang tersusun secara sistematis, mencakup unsur pengajaran, bimbingan, dan pelatihan yang dirancang untuk membentuk pengalaman belajar peserta didik secara menyeluruh (Nurfitri et al., 2023). Dalam pandangan ini, kurikulum tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pelajaran semata, tetapi juga melibatkan proses pendampingan dan pengembangan keterampilan yang mendukung pertumbuhan intelektual dan personal peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang mencakup perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Struktur sistematis dalam kurikulum memungkinkan proses pembelajaran berjalan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan belajar individu serta mendukung pembentukan kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman.

Kurikulum merupakan salah satu komponen esensial dalam sistem pendidikan yang berperan sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran di berbagai satuan pendidikan, termasuk sekolah dan madrasah. Keberadaan kurikulum yang terstruktur memungkinkan jalannya pendidikan berlangsung secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika kurikulum diterapkan secara optimal, hal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas kegiatan pembelajaran dan perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Posisi kurikulum dalam

sistem pendidikan sangatlah strategis, karena berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengorganisasian materi, metode, evaluasi, serta strategi pembelajaran. Oleh karena itu, penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Diperlukan perencanaan yang matang, pendekatan ilmiah, serta prinsip-prinsip sistemik yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika sosial dan budaya. Administrasi kurikulum yang baik menjadi salah satu faktor pendukung dalam memastikan bahwa proses pendidikan dapat difasilitasi secara efektif dan efisien. Setiap tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perumusan tujuan, pemilihan materi ajar, metode penyampaian, hingga evaluasi hasil belajar, harus diarahkan pada pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dengan demikian, kurikulum berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan berbagai uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memegang peran yang sangat vital dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di Indonesia. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam proses pembelajaran, tetapi juga menjadi fondasi strategis yang menentukan arah, isi, dan metode pendidikan yang dijalankan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, apabila implementasi kurikulum dilakukan secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kualitas pendidikan secara menyeluruh. Ketidaksesuaian dalam penerapan kurikulum tidak hanya akan berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga akan memengaruhi pencapaian kompetensi peserta didik, efektivitas kerja pendidik, serta mutu lulusan yang dihasilkan. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kurikulum disusun, diterapkan, dan

dievaluasi secara berkelanjutan dalam konteks yang relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman.

2.1.3 Fungsi Kurikulum

Secara umum, kurikulum disusun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pengembangan kepribadian, potensi, dan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, sesuai dengan arah dan cita-cita pendidikan nasional. Kurikulum tidak hanya terbatas pada daftar mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, tetapi mencakup seluruh aspek yang memengaruhi pengalaman belajar siswa, termasuk peran guru, metode pengajaran, lingkungan belajar, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks ini, kurikulum berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis, logis, dan terintegrasi yang dirancang untuk mengarahkan proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Sebagai sebuah program pembelajaran, kurikulum memuat keterpaduan antara tujuan, perencanaan, dan harapan yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan. Sinkronisasi antara ketiga elemen ini menjadi kunci agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan secara konsisten dan efektif. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai harus sejalan dengan rancangan pembelajaran yang disusun, dan pelaksanaannya pun harus mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dengan demikian, kurikulum bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi merupakan perangkat strategis dalam membentuk kualitas dan karakter generasi penerus bangsa.

Menurut Alexander Inglis, kurikulum memiliki beberapa fungsi penting yaitu:

1. Fungsi Penyesuaian: Individu hidup dalam lingkungan yang selalu berubah dan dinamis, sehingga mereka perlu mampu beradaptasi secara fleksibel. Kurikulum berperan sebagai alat pendidikan yang membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pribadi, sehingga mereka dapat menjadi individu yang seimbang.

2. Fungsi Integrasi: Kurikulum berfungsi untuk mendidik individu agar menjadi bagian yang terintegrasi dalam masyarakat. Karena individu adalah bagian dari komunitas, integrasi ini penting untuk berkontribusi dalam pembentukan dan penguatan masyarakat.
3. Fungsi Diferensiasi: Kurikulum harus mampu mengakomodasi perbedaan individu dalam masyarakat. Diferensiasi ini mendorong pemikiran kritis dan kreatif yang pada gilirannya dapat memajukan kemajuan sosial.
4. Fungsi Persiapan: Kurikulum berperan dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Persiapan ini penting karena sekolah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan atau minat siswa.
5. Fungsi Pemilihan: Terdapat hubungan erat antara pengakuan perbedaan pemilihan. Mengakui perbedaan memberikan kesempatan bagi individu untuk memilih apa yang mereka inginkan dan minati. Ini merupakan kebutuhan penting dalam masyarakat demokratis, sehingga kurikulum perlu dirancang dengan garis depan.
6. Fungsi Diagnostik: Salah satu aspek pendidikan adalah membantu siswa memahami dan menerima diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini dapat dicapai melalui eksplorasi diri, dimana kriteria berfungsi untuk mendiagnosis dan membimbing siswa dalam pengembangan potensi mereka secara optimal. (Zahra et al., 2023)

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Kurikulum

Menurut Soetopo dan Soemanto, terdapat sejumlah faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Faktor-faktor ini tidak muncul secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Dekolonisasi dan Kemandirian Bangsa

Pembebasan sejumlah wilayah di dunia dari dominasi kolonial menjadi pemicu awal dari reformasi pendidikan, termasuk di dalamnya perubahan kurikulum. Ketika suatu negara memperoleh kemerdekaan, muncul kesadaran kolektif bahwa sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan merupakan warisan kolonial yang tidak mencerminkan aspirasi dan identitas nasional. Oleh karena itu, negara-negara yang baru merdeka cenderung merekonstruksi kurikulum mereka agar selaras dengan nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan pembangunan nasional, serta cita-cita pendidikan yang lebih mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

2. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat juga menjadi salah satu faktor krusial dalam mendorong perubahan kurikulum. Inovasi dalam berbagai disiplin ilmu telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi. Hal ini secara otomatis menuntut kurikulum untuk menyesuaikan isi, pendekatan, dan strategi pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan zaman. Pembaruan materi ajar dan metode pengajaran menjadi keharusan agar peserta didik mampu mengembangkan literasi digital, berpikir kritis, dan kompetensi abad ke-21 yang dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.

3. Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Pendidikan yang Semakin Luas

Pertambahan populasi global yang signifikan mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan layanan pendidikan. Konsekuensinya, sistem pendidikan yang ada perlu ditinjau ulang untuk mengakomodasi lonjakan jumlah peserta didik secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, kurikulum harus disesuaikan agar mampu menjawab tantangan baru seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi pendidik yang tidak merata, serta perbedaan latar belakang sosial-ekonomi peserta didik. Perubahan kurikulum menjadi langkah

strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketiga faktor tersebut secara umum telah memberikan kontribusi besar terhadap evolusi kurikulum yang tidak bersifat linier, melainkan berbentuk spiral. Artinya, perubahan kurikulum tidak sekadar mengulang masa lalu, tetapi selalu mengarah pada perbaikan dan penguatan dari titik sebelumnya ke titik yang lebih maju (Hermiati, 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting agar proses pengembangan kurikulum tidak dilakukan secara reaktif, melainkan berdasarkan analisis yang cermat terhadap dinamika global dan kebutuhan nasional.

Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pengembangan kurikulum diantaranya: Faktor filosofis, psikologis, sosial budaya, politik, pembangunan negara dan perkembangan dunia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Fadli, 2010).

1. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pendidikan dan ilmu keguruan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan isi materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Selain itu, pengetahuan teknologi yang sangat mendukung dalam pengembangan media pembelajaran pendidikan. Ilmu pendidikan dan keguruan mempengaruhi pengembangan kurikulum pada aspek penguasaan ilmu pendidikan dan juga bidang studi serta kompetensi mengajar dari para lulusan sebagai calon pendidik yang dihasilkan.

2. Masyarakat

Sekolah sebagai agen yang mempersiapkan anak didik untuk kehidupan di masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat sekitar. Masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum memiliki andil karena salah satu

kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah dunia usaha. Dengan perkembangan dunia usaha yang ada dalam kehidupan masyarakat menuntut sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja dan berusaha, sehingga secara tidak langsung hal ini mempengaruhi pengembangan kurikulum yang lebih baik untuk bisa mencetak lulusan yang memiliki daya saing.

3. Sistem Nilai

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena membentuk dasar dari perilaku manusia dan interaksi sosial, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, toleransi maupun kemandirian. Dengan nilai-nilai ini dapat membantu membentuk identitas sosial dan moral yang bermuara pada bagaimana seseorang berinteraksi satu sama lain demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Sekolah sebagai bagian dari agen masyarakat bertanggung jawab dalam menanamkan dan memelihara nilai-nilai tersebut dengan cara mengintegrasikan dalam sebuah kurikulum yang menjadi ruh dari sebuah pendidikan. Israel Scheffer (dalam Sukmadinata, 2017: 60) mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespons dan berlandaskan pada perkembangan sosial – budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global.

4. Filosofil

Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Aliran Filsafat Perenialisme, Essensialisme, Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan Model Kurikulum Subjek-Akademis. Sedangkan, filsafat progresivisme

memberikan dasar bagi pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Pribadi. Sementara, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan Model Kurikulum Interaksional. Dalam prakteknya, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara selektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Meskipun demikian saat ini, pada beberapa negara dan khususnya di Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitikberatkan pada filsafat rekonstruktivisme. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum (dari teacher center menjadi student center).

5. Psikologis

Sukmadinata (2017: 46) mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu (1) psikologi perkembangan yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkaitan dengan perkembangannya dan (2) psikologi belajar yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hal-hal yang berhubungan perkembangan individu, sedangkan psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum.

6. Politik

Wiles Bondi (dalam Sudrajat, 2008) dalam bukunya 'Curriculum Development: A Guide to Practice' turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap kali pergantian kursi kepemimpinan suatu negara, maka berganti pula kebijakan sehingga

mempengaruhi perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan.

7. Pembangunan Negara dan Perkembangan Dunia

Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun seharusnya mempunyai kurikulum yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu pengembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan dunia.

8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan meta-kognisi dan kompetensi untuk berfikir dan belajar bagaimana belajar (*learning to learn*) dalam mengakses, memilih dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. (Marzuqi & Ahid, 2023)

2.1.5 Perubahan Kurikulum Dari K.13 Ke Kurikulum Merdeka

Dalam dinamika sistem pendidikan nasional, perubahan kurikulum merupakan langkah strategis yang secara periodik dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal. Di Indonesia, perubahan kurikulum telah menjadi bagian integral dari proses pembaruan sistem pendidikan agar selalu sejalan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global yang semakin kompleks. Salah satu transformasi signifikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah peralihan dari Kurikulum 2013 (K13) ke Kurikulum Merdeka.

Perubahan kurikulum pada hakikatnya merupakan bentuk adaptasi sistemik terhadap perubahan sosial, teknologi, dan pendekatan pedagogis yang terus berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Setiawati (2022), pergantian dari K13 ke Kurikulum Merdeka mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan dunia kerja yang dinamis. Kurikulum tidak hanya menentukan materi ajar di dalam kelas, tetapi juga sangat memengaruhi strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru, termasuk kecepatan penyampaian materi, pendekatan yang digunakan, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan belajar yang beragam.

Kurikulum Merdeka didesain untuk memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran berbasis proyek, yang bertujuan untuk membentuk kompetensi esensial dan profil pelajar Pancasila secara utuh. Namun demikian, seperti halnya setiap bentuk reformasi pendidikan,

implementasi Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai tantangan. Mabsutsah dan Yushardi (2022) serta Siti Yuliani dan Andaryani (2023) mengungkapkan bahwa proses transisi kurikulum ini dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman guru terhadap paradigma baru, keterbatasan fasilitas penunjang, serta belum optimalnya sistem evaluasi untuk mengukur efektivitas kurikulum secara menyeluruh.

2.1.5.1 Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan salah satu bentuk reformasi pendidikan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap dinamika global dan kebutuhan untuk menciptakan generasi masa depan yang adaptif, kritis, dan berdaya saing tinggi. Esensi utama dari kurikulum ini terletak pada pendekatan penyederhanaan struktur kurikulum serta penerapan pembelajaran yang bersifat tematik-integratif. Artinya, materi pelajaran tidak lagi disampaikan secara terpisah-pisah, melainkan diorganisasikan dalam tema-tema yang menyatukan berbagai disiplin ilmu secara holistik (Setiawati, 2022).

Tujuan fundamental dari Kurikulum 2013 adalah untuk membekali peserta didik dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*), di mana peserta didik didorong untuk aktif dalam melakukan observasi, mengajukan pertanyaan, bernalar secara logis, serta mengomunikasikan atau mempresentasikan hasil pemikiran dan temuannya dalam proses pembelajaran (Masyhud, 2014). Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*).

Secara substantif, objek kajian dalam Kurikulum 2013 meliputi fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pendekatan ini

tidak hanya memperkuat keterkaitan antarmata pelajaran, tetapi juga menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Selain itu, Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis sejak tahun 2004. Kurikulum ini mengintegrasikan tiga domain kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada penjelasan Pasal 35. Dalam konteks ini, kompetensi lulusan dipahami sebagai kualifikasi kemampuan yang mencerminkan standar nasional pendidikan dan harus dicapai secara seimbang dan terpadu.

2.1.5.2 Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu bentuk reformasi kurikulum yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan pemulihan pembelajaran pascapandemi serta upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan kontekstual. Kurikulum ini didesain dengan pendekatan pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam dan fleksibel, sehingga memungkinkan peserta didik untuk memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep-konsep inti dan mengembangkan kompetensi secara lebih mendalam (Permendikbud, 2023).

Salah satu keunggulan utama dari Kurikulum Merdeka adalah pemberian keleluasaan kepada guru dalam memilih, merancang, dan menerapkan berbagai perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, serta karakteristik peserta didik. Dengan pendekatan ini, guru tidak lagi terikat secara kaku pada struktur materi yang seragam, melainkan diberdayakan untuk mengakomodasi diferensiasi pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kemampuan siswa di masing-masing satuan pendidikan.

Kurikulum ini awalnya diperkenalkan sebagai kurikulum prototipe, yang kemudian berkembang menjadi kerangka kurikulum nasional yang menekankan pada esensialisasi materi, pengembangan karakter, serta peningkatan kompetensi peserta didik. Fokus Kurikulum Merdeka tidak hanya terletak pada pencapaian hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan profil pelajar Pancasila sebagai representasi generasi yang memiliki kecakapan abad ke-21, berkarakter kuat, dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial.

Adapun karakteristik utama Kurikulum Merdeka yang mendukung pemulihan dan penguatan kualitas pembelajaran meliputi:

- a. Pembelajaran berbasis proyek yang berorientasi pada penguatan soft skill dan pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Metode ini mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memecahkan masalah nyata dan membangun kolaborasi, tanggung jawab, serta kreativitas.
- b. Penekanan pada materi esensial, yang memberikan ruang waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami dan menguasai kompetensi dasar secara mendalam, khususnya dalam literasi dan numerasi sebagai fondasi pembelajaran lintas mata pelajaran.
- c. Pemberian fleksibilitas kepada guru untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa, serta mengintegrasikannya dengan potensi dan kekhasan muatan lokal.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya memberikan keleluasaan kepada guru sebagai perancang pembelajaran, tetapi juga mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mengelola proses belajarnya sesuai dengan minat, kebutuhan, dan potensi yang dimilikinya (Adolph, 2016).

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, serta relevan dengan tantangan dan peluang masa depan.

Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototipe, pertama kali diimplementasikan pada sekitar 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam Program Sekolah Penggerak. Berdasarkan hasil implementasi awal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengidentifikasi sejumlah karakteristik utama dari Kurikulum Merdeka yang menjadi pembeda dengan kurikulum sebelumnya, serta sekaligus mencerminkan arah transformasi pendidikan nasional (pskp.kemdikbud, 2023; Adolph, 2016).

a. Pembelajaran Berbasis Proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Salah satu inovasi utama dalam Kurikulum Merdeka adalah penerapan project-based learning yang diwujudkan melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dalam pendekatan ini, proses pembelajaran tidak lagi sekadar berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kesadaran kontekstual peserta didik. Siswa diberi ruang untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu nyata di sekitar mereka, bekerja dalam kelompok, menghasilkan karya konkret, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mendikbudristek menegaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini bertujuan membekali siswa dengan soft skills yang esensial untuk kehidupan mereka setelah menyelesaikan pendidikan formal, seperti kemampuan berkolaborasi, berinovasi, dan membangun integritas diri.

b. Penekanan pada Materi Esensial dan Kompetensi Dasar

Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip penyederhanaan konten pembelajaran, sehingga memungkinkan proses belajar berlangsung secara lebih fokus, mendalam, dan bermakna.

Materi pelajaran diseleksi berdasarkan esensialitasnya terhadap penguasaan kompetensi inti, khususnya dalam bidang literasi dan numerasi. Dengan beban materi yang lebih terarah, guru memiliki ruang waktu yang lebih cukup untuk membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh dan tidak terburu-buru dalam mengejar target penyelesaian silabus. Standar capaian pembelajaran pun disusun secara lebih realistis, sehingga proses belajar menjadi tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan dan inklusif.

- c. Fleksibilitas dalam pembelajaran yang terdiferensiasi dengan menyesuaikan kemampuan siswa, serta konteks dan muatan lokal. Kurikulum Merdeka tersebut pembelajaran menjadi lebih merdeka, karena memberikan berbagai kebebasan kepada siswa, guru dan sekolah. Untuk siswa, tidak ada program peminatan di tingkat SMA, sehingga siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan cita-citanya. Jadi, siswa tidak terpisah pisah berdasarkan jurusan IPA atau IPS. Bagi guru diberikan kebebasan untuk mengajar sesuai dengan tahapan pencapaian dan perkembangan siswa. Selama ini guru dipaksa untuk terus mengejar capaian materi, tanpa memikirkan siswa yang ketinggalan materi. Sedangkan sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, siswa, dan sekolah masing-masing.

2.1.6 Indikator Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum merupakan salah satu strategi penting dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan kompeten. Pergeseran dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka merupakan bentuk konkret dari proses transformasi tersebut, yang dirancang untuk merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks (Indriani & Marno, 2024).

Transisi ini membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek dalam ekosistem pendidikan, termasuk perubahan pada struktur pembelajaran, peran guru, dan pendekatan dalam proses belajar-mengajar. Seiring dengan dinamika zaman, kurikulum tidak hanya dituntut untuk mengikuti tren perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan aktual masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum perlu didasarkan pada indikator-indikator tertentu yang menunjukkan perlunya penyesuaian sistemik dan substansial dalam proses pendidikan.

Adapun beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan efektivitas perubahan kurikulum antara lain:

1. Persepsi Guru terhadap Perubahan Kebijakan Kurikulum

Salah satu indikator awal yang mencerminkan efektivitas perubahan kurikulum adalah bagaimana guru memandang dan merespons kebijakan baru yang diterapkan. Persepsi yang positif menunjukkan adanya kesiapan dan penerimaan terhadap transformasi, sedangkan persepsi yang negatif bisa menjadi sinyal bahwa diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, atau perbaikan dalam desain kebijakan itu sendiri.

2. Perubahan Metode Pengajaran

Perubahan kurikulum seharusnya mendorong adopsi metode pembelajaran yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan peserta didik. Indikator ini dapat diamati melalui variasi strategi mengajar yang diterapkan guru, seperti pendekatan berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran diferensiasi, serta integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran.

3. Profesionalisme Guru

Kualitas pelaksanaan kurikulum sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas guru. Indikator ini mencakup kompetensi pedagogik, penguasaan materi, kemampuan manajemen kelas, dan kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Perubahan kurikulum

idealnya mendorong peningkatan kapasitas profesional guru secara berkelanjutan.

4. Kepuasan Kerja Guru

Tingkat kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana guru merasa dihargai, nyaman, dan termotivasi dalam melaksanakan tugasnya di bawah kurikulum baru. Jika kurikulum memberikan ruang kreativitas, dukungan administratif, serta relevansi dalam praktik pembelajaran, maka kepuasan kerja cenderung meningkat.

5. Motivasi Kerja Guru

Motivasi kerja menjadi indikator penting lainnya dalam menilai keberhasilan implementasi kurikulum. Kurikulum yang dirancang dengan memperhatikan realitas di lapangan, serta memberikan peluang pengembangan diri dan penghargaan terhadap prestasi guru, akan mampu meningkatkan semangat kerja dan dedikasi guru dalam melaksanakan tugasnya.

2.2 Kinerja Guru

2.2.1 Pengertian Kinerja Guru

Secara umum, istilah *kinerja* mengacu pada hasil kerja atau pencapaian yang ditunjukkan oleh individu dalam melaksanakan tugasnya, dan mencerminkan kualitas serta efektivitas pelaksanaan tanggung jawab yang diemban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:570), kinerja diartikan sebagai hasil yang dicapai, prestasi yang ditampilkan, serta kemampuan seseorang dalam bekerja. Dalam konteks organisasi, Rusman (2013) menegaskan bahwa kinerja merupakan perwujudan dari perilaku individu yang berorientasi pada pencapaian prestasi tertentu dalam lingkungan kerja formal.

Dalam dunia pendidikan, kinerja guru merujuk pada kemampuan dan kesungguhan seorang pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya secara optimal. Asterina dan Sukoco (2019) menjelaskan bahwa kinerja guru mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar, penciptaan suasana kelas yang kondusif, pengelolaan kondisi belajar yang

efektif, hingga penilaian hasil belajar peserta didik. Guru yang berkinerja baik adalah guru yang tidak hanya memenuhi tanggung jawab administratif, tetapi juga memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni serta menunjukkan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya, Gunawan dkk. (2018) menambahkan bahwa guru yang memiliki kinerja profesional ditandai dengan kemampuan dalam mendesain perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar secara sistematis, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dengan cermat. Aktivitas ini menunjukkan bahwa kinerja guru berperan langsung dalam mendukung pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat sekolah. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sementara itu, Syarwani dkk. (2018), sebagaimana dikutip oleh Joen (2022:13), menyatakan bahwa kinerja guru berkaitan erat dengan tugas-tugas pengajaran, di mana hasil kerja guru mencerminkan kemampuan dalam menyampaikan pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik secara relevan dengan tahap perkembangan berpikir mereka. Dengan kata lain, kinerja guru tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan pedagogis yang memengaruhi kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Rorimpandey (2020) menegaskan bahwa kinerja guru menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sekolah dalam menjalankan fungsi pendidikannya. Tingkat kinerja yang tinggi menunjukkan keberhasilan kolaborasi antar komponen sekolah, termasuk kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan lingkungan sekolah secara luas. Sebaliknya, rendahnya kinerja guru dapat menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks perubahan kebijakan, termasuk perubahan kurikulum, kinerja guru menjadi sorotan penting, mengingat implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas guru dalam mengadaptasi perubahan tersebut.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai oleh guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah secara legal, etis, dan profesional. Kinerja ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang tercermin dalam tindakan, keputusan, dan hasil kerja nyata di lingkungan pembelajaran. Dengan demikian, kinerja guru tidak hanya dapat diukur dari seberapa baik tugas formal dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana guru mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi pendidikan tempatnya mengabdikan.

2.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Kinerja guru tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan. Menurut Mulyasa dalam Nurrochmah dan Sontani (2020:22) serta Siahaan dan Meilani (2019), terdapat sejumlah faktor utama yang berperan dalam meningkatkan atau menurunkan kinerja seorang guru di lingkungan kerja. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting agar pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Berikut adalah uraian mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Sikap Mental: Motivasi, Disiplin, dan Etika

Sikap mental merupakan fondasi utama yang membentuk perilaku profesional seorang guru. Motivasi kerja yang tinggi, kedisiplinan dalam menjalankan tugas, serta etika dalam berinteraksi dengan siswa dan sesama rekan kerja menjadi indikator penting dalam menciptakan kinerja yang optimal. Guru yang memiliki sikap mental positif akan cenderung lebih bertanggung jawab, konsisten, dan berorientasi pada hasil.

2. Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan formal seorang guru memiliki pengaruh langsung terhadap wawasan, pemahaman pedagogis, dan kemampuan dalam menyampaikan materi ajar. Guru dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kapasitas akademik dan pedagogik

yang lebih kuat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses pembelajaran.

3. Keterampilan

Selain pendidikan formal, keterampilan profesional—baik dalam hal manajemen kelas, penggunaan media pembelajaran, maupun penguasaan teknologi informasi—juga sangat menentukan kualitas kinerja guru. Keterampilan ini dapat diasah melalui pelatihan, workshop, maupun pengalaman langsung di lapangan.

4. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin institusi pendidikan sangat penting dalam menciptakan iklim kerja yang produktif. Gaya kepemimpinan yang demokratis, komunikatif, dan suportif akan memberikan pengaruh positif terhadap motivasi kerja guru dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga.

5. Hubungan Industrial

Hubungan yang harmonis antara guru dengan manajemen sekolah, dinas pendidikan, maupun organisasi profesi turut memengaruhi kinerja. Komunikasi yang baik dan adanya penghargaan terhadap kontribusi guru dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja.

6. Tingkat Penghasilan yang Memadai

Imbalan finansial yang adil dan layak akan mendorong guru untuk bekerja dengan lebih baik. Penghasilan yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan semangat kerja dan bahkan mendorong guru mencari pekerjaan tambahan di luar institusi pendidikan.

7. Kesehatan

Kondisi fisik dan mental yang sehat menjadi syarat dasar bagi guru untuk dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Masalah kesehatan sering kali menjadi penghambat produktivitas dan kualitas dalam proses pembelajaran.

8. Jaminan Sosial dari Pemerintah/Dinas Pendidikan

Dukungan berupa jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan profesi, dan pensiun menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa

aman bagi guru. Hal ini secara tidak langsung akan memengaruhi dedikasi dan komitmen mereka terhadap profesinya.

9. Lingkungan Sosial dan Suasana Kerja

Lingkungan kerja yang nyaman, kondusif, dan didukung oleh budaya kerja positif akan menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Interaksi yang sehat antarpegawai juga berperan dalam meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

10. Kualitas Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Fasilitas belajar yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, akses terhadap teknologi, serta ketersediaan bahan ajar, sangat memengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Sarana yang kurang mendukung sering kali menjadi kendala dalam penerapan strategi pembelajaran yang efektif.

Selain faktor-faktor umum yang telah dijelaskan sebelumnya, Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2008:74), sebagaimana dikutip oleh Siahaan dan Meilani (2019), mengemukakan bahwa kinerja seseorang, termasuk guru, dipengaruhi oleh lima dimensi utama yang saling berinteraksi satu sama lain. Kelima faktor tersebut menggambarkan bagaimana unsur individu, organisasi, dan lingkungan membentuk kualitas dan capaian kerja seorang profesional. Adapun kelima faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Personal Factor*

Faktor personal berkaitan dengan karakteristik internal individu yang mencakup keterampilan, kompetensi, serta tingkat motivasi. Dalam konteks kinerja guru, hal ini berarti bahwa seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik, keahlian profesional, serta dorongan intrinsik yang tinggi, cenderung mampu menunjukkan performa kerja yang lebih baik. Pengembangan kapasitas individu melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional sangat diperlukan untuk memperkuat aspek ini.

2. *Leadership Factor*

Faktor kepemimpinan menyangkut sejauh mana dorongan, arahan, serta dukungan yang diberikan oleh manajer atau atasan langsung—inilah yang dalam konteks sekolah, diwakili oleh kepala sekolah atau koordinator akademik. Kepemimpinan yang inspiratif dan suportif dapat memotivasi guru untuk bekerja secara optimal, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif terhadap peningkatan kinerja.

3. *Team Factor*

Kinerja guru juga sangat dipengaruhi oleh faktor tim, yaitu dukungan dari rekan kerja atau sesama tenaga pendidik. Lingkungan kerja yang kolaboratif dan adanya semangat kerja tim memungkinkan guru saling berbagi pengalaman, strategi pengajaran, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Sinergi antar guru dalam satu satuan pendidikan dapat mendorong pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih efektif.

4. *System Factor*

Faktor sistem mencakup berbagai kebijakan, prosedur kerja, dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi atau lembaga tempat guru bekerja. Sistem yang jelas, efisien, dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai akan memperlancar proses pelaksanaan tugas guru. Sebaliknya, sistem yang tidak terorganisir atau kurang mendukung akan menjadi hambatan dalam peningkatan kinerja, bahkan dapat menurunkan semangat dan produktivitas guru.

5. *Contextual/Situational Factor*

Faktor kontekstual atau situasional merujuk pada dinamika eksternal maupun internal yang memengaruhi situasi kerja guru, seperti perubahan kebijakan pendidikan, transisi kurikulum, beban administrasi, serta tekanan dari masyarakat atau orang tua siswa. Guru harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan lingkungan ini agar tetap produktif dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

2.2.3 Indikator Kinerja Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui *Platform Rapor Pendidikan* telah merumuskan delapan indikator utama

yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja guru di satuan pendidikan. Indikator-indikator ini mencerminkan dimensi pedagogik dan profesional yang esensial dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik secara holistik. Berikut adalah penjabaran dari kedelapan indikator kinerja guru yang dimaksud:

1. Keteraturan Suasana Kelas

Indikator ini menilai sejauh mana guru mampu menciptakan lingkungan kelas yang tertib, terorganisir, dan mendukung suasana belajar yang nyaman. Keteraturan suasana kelas menjadi prasyarat penting untuk membangun fokus belajar peserta didik dan menciptakan kondisi psikologis yang positif dalam proses pembelajaran.

2. Penerapan Disiplin Positif

Disiplin yang diterapkan guru bukan bersifat hukuman, tetapi mengedepankan pendekatan yang membangun kesadaran dan tanggung jawab siswa atas perilakunya. Guru yang berkinerja baik mampu menerapkan disiplin positif secara konsisten, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk mengikuti aturan secara sukarela.

3. Umpan Balik Konstruktif

Kinerja guru juga dapat diukur dari kemampuannya memberikan umpan balik yang bersifat membangun. Umpan balik yang efektif tidak hanya menyampaikan kekurangan peserta didik, tetapi juga memberikan arahan konkret untuk perbaikan, serta menumbuhkan semangat belajar dan refleksi diri.

4. Perhatian dan Kepedulian

Guru yang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi emosional, sosial, dan akademik peserta didik mencerminkan profesionalisme dalam membangun relasi yang humanis. Indikator ini menilai sejauh mana guru peka terhadap kebutuhan individu siswa dan mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran berdasarkan keunikan masing-masing peserta didik.

5. Ekspektasi pada Peserta Didik

Ekspektasi yang tinggi namun realistis dari guru terhadap siswa dapat menjadi dorongan kuat bagi peserta didik untuk mencapai potensi terbaiknya. Guru yang menetapkan standar capaian yang jelas dan menantang akan mendorong siswa untuk memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi.

6. Aktivitas Interaktif

Kinerja guru juga diukur dari sejauh mana ia mampu memfasilitasi pembelajaran yang bersifat interaktif. Aktivitas yang mendorong dialog, kolaborasi, serta partisipasi aktif dari siswa menjadi indikator penting dalam menciptakan proses belajar yang dinamis dan bermakna.

7. Instruksi yang Adaptif

Guru yang profesional mampu menyesuaikan instruksi atau arahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar siswa. Instruksi yang adaptif juga mencerminkan fleksibilitas guru dalam menghadapi keberagaman peserta didik, serta kemampuannya dalam menerapkan prinsip diferensiasi pembelajaran.

8. Instruksi Pembelajaran

Indikator ini menilai kualitas instruksi atau penyampaian materi oleh guru. Instruksi yang baik mencakup kejelasan penyampaian tujuan pembelajaran, struktur materi yang sistematis, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, instruksi yang efektif juga melibatkan penggunaan media atau metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik.

2.3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Lidya Novalita, Nur Ahyani, Syaiful Eddy. 2023	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kurikulum Merdeka Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri Program Sekolah Penggerak	Kuantitatif	Simpulan, ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kurikulum merdeka terhadap kinerja guru SMA Negeri Program Sekolah Penggerak Se Kecamatan Kayuagung. (Novalita <i>et al.</i> , 2023)

Tio Bagus Dharmawan Drs. Warsono, M.M. 2017	Pengaruh Profesionalisme dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Guru Dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum Pada Yayasan Pendidikan MTs Annajah, Jakarta Selatan	Kuantitatif	Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa: penelitian ini membuktikan bahwa profesionalisme dan perilaku kerja berkontribusi signifikan terhadap kinerja guru, baik sebelum maupun sesudah moderasi. (Dharmawan, 2017)
Bunga Iifa Asifa, Fathul Fauzi. 2021	Pengaruh Perubahan Manajemen Kurikulum Saat Pandemi covid – 19 Terhadap Kinerja Guru Di Mi –Darul Muta'allimin Sidoarjo	Kuantitatif	Perubahan manajemen kurikulum saat pandemic covid – 19 terhadap kinerja guru di MI – Darul Muta'allimin Sidoarjo terdapat hubungan yang sangat signifikan. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan nilai hitung R sebesar 0,950 yang berarti nilai koefisiennya cukup kuat. (Asifa & Fauzi, 2021)
Muchama d Arif Kurniawan, Saiful Falah, Dea Mutiarasani. 2023	Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Kinerja Guru Di Sma Ibnu Aqil Bogor	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara implementasi kurikulum merdeka terhadap kinerja guru yang mengandung arti bahwasannya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai korelasi variabel X dan Y sebesar 0,553 dengan taraf sig. 5%. (Arif Kurniawan & Falah, 2023)
Ria Natalia Damayanti Sarumpaet , Tri Widayat sih, Melia Rosani	Penerapan Kurikulum Merdeka dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Kertapati	Kuantitatif	1. Kurikulum merdeka berpengaruh terhadap Kinerja guru SD Negeri Se Kecamatan Kertapati. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung sebesar 2,373 lebih besar dari ttabel sebesar 1,659, ($2,373 > 1,659$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 ($0,019 < 0,05$). 2. Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja guru SD Negeri Se Kecamatan Kertapati. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung sebesar 2,679 lebih besar dari ttabel sebesar 1,659, ($2,679 > 1,659$) dengan tingkat

			signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$). 3. Kurikulum merdeka dan motivasi kerja berpengaruh terhadap Kinerja guru SD Negeri Se Kecamatan Kertapati. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung $> F$ tabel; $84,161 > 2,69$ atau nilai α yakni $0,000 < 0,05$
Ika Wulandari, Tri Widayatsih, Pahlawan, Indah Ardianti, Ika Lestari.	Pengaruh Kurikulum Merdeka dan Kinerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Jakabaring	Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisa data pembahasan terkait tentang pengaruh kurikulum merdeka dan kinerja guru terhadap hasil belajar siswa SD Negeri se Kecamatan Jakabaring, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Kurikulum merdeka berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa SD Negeri se Kecamatan Jakabaring, hal ini ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 2,373 lebih besar dari ttabel sebesar 1,660, ($2,373 > 1,660$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,19 lebih kecil dari 0,05 ($0,19 < 0,05$). 2. Kinerja guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa SD Negeri se Kecamatan Jakabaring, hal ini ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 2,679 lebih besar dari ttabel sebesar 1,660, ($2,679 > 1,660$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$). 3. Kurikulum merdeka dan kinerja guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa SD Negeri se Kecamatan Jakabaring, hal ini ditunjukkan dari nilai F hitung $> F$ tabel; $384,161 > 2,60$ atau nilai α yakni $0,000 < 0,05$.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

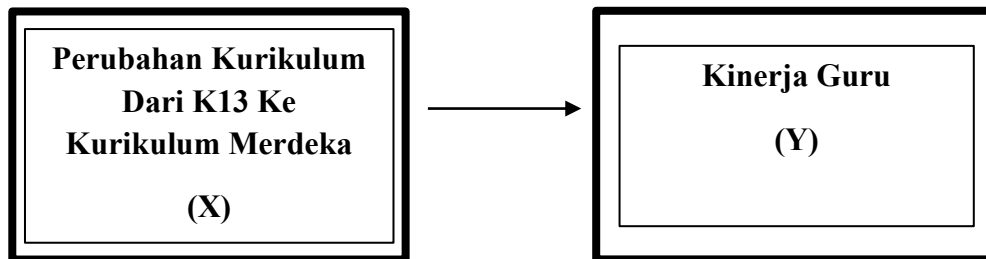
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (dalam skripsi Diah, 2011:30) (Ningrum, 2017) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah

merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat disimpulkan kerangka berpikir untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen (Perubahan Kurikulum yaitu X) berpengaruh pada variabel dependen (Kinerja Guru yaitu Y) sebagai usaha untuk mencapai tujuan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

2.5 Hipotesis

Menurut Ismael Nurdin dan Sri Hartati (2019) (Ummah, 2019), hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final; jawaban sementara; dugaan sementara; yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel.

Maka penelitian menyusun hipotesis sebagai berikut:

Ha : Ada pengaruh Perubahan Kurikulum Dari K13 Ke Kurikulum Merdeka Terhadap Kinerja Guru Di UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat

Ho : Tidak Ada pengaruh Perubahan Kurikulum Dari K13 Ke Kurikulum Merdeka Terhadap Kinerja Guru Di UPTD SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat.